



**Judul** : Disetujui DPR jadi Hakim MK, Inosentius diminta jangan hantam DPR  
**Tanggal** : Kamis, 21 Agustus 2025  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 3

Disetujui DPR Jadi Hakim MK

# Inosentius Diminta Jangan Hantam DPR

**Komisi III DPR menyetujui Inosentius Samsul menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau *fit and proper test* Rabu (20/8/2025). Persetujuan tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR yang digelar hari ini.**

USAU mengetuk pahu tanda persetujuan. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, Inosentius merupakan calon tunggal yang telah menempuh penjaringan yang dilakukan Komisi III DPR. Inosentius memenuhi syarat-syarat administratif sebelum mengikuti uji kelayakan itu.

Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan, Inosentius memaparkan visi dan misinya untuk MK ke depan. "Setelah itu, dia juga diberi beberapa pertanyaan oleh sejumlah Anggota Komisi III DPR yang hadir," terang Habiburokhman di Komplek Parlemen, Jakarta.

Dia juga memastikan, Inosentius bukan calon titipan, tapi merupakan satu-satunya sosok yang diusulkan. DPR berhak mengusulkan dua atau hanya satu calon hakim MK. "Bukan titipan lagi, ini memang calon

kami. Anda baca tadi ya di ketentuan Undang-Undang (UU) MK, ini calon yang diusulkan DPR," katanya.

Habiburokhman menjelaskan pemilihan Inosentius sebagai calon tunggal hakim konstitusi menggunakan mekanisme penjaringan aktif. Jika ada sosok lain yang ingin mendaftar tapi DPR tidak memilih Inosentius, maka dia lah yang tetap akan dipilih.

Mekanisme tersebut dilakukan seperti talent scouting, dan lazim dilakukan untuk perekrutan dalam posisi apa pun. Untuk itu, dia mendorong panitia seleksi untuk lembaga-lembaga lainnya

agar aktif melakukan perekrutan dengan mencari orang-orang yang punya kualitas, dengan tak sekadar menunggu pendaftaran. "Kalau orang yang tidak mau daftar, kita dorong, dan kita minta agar teguh dalam pendirian menghadapi hakim-hakim yang

Dalam fit and proper test, anggota Komisi III Safaruddin mengingatkan Inosentius agar tidak memperpanjang asal usulnya sebagai calon hakim pilihan DPR. "Pokoknya kami akan memperjuangkan sebagai utusan DPR. Tapi setelah sampai di MK lupa bahwa bapak itu dipilih dari DPR," ujar Safaruddin.

Dia mengatakan, dari sembilan hakim MK, tiga di antaranya merupakan pilihan dari anggota DPR. Dia meminta agar Inosentius tidak menghantam atau melawan DPR. Maksudnya, agar Inosentius punya keyakinan kuat, keteguhan, dan bukan menimbulkan polemik atau kegaduhan di masyarakat.

Rudianto menyoroti beberapa putusan MK yang dinilai melampaui kewenangannya. Salah satunya adalah keputusan yang menimbulkan polemik atau kegaduhan di masyarakat.

Rudianto menyoroti beberapa putusan MK yang dinilai melampaui kewenangannya. Salah satunya adalah keputusan terhadap UU, bukan membentuk norma baru. Kalau membentuk norma, itu kewenangan Pemerintah

dan DPR," ujar politikus Partai NasDem itu.

Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra menambahkan, proses uji kelayakan dan kepatutan merupakan momen penting memastikan kuali-

tas hakim konstitusi yang akan mengawal tegaknya konstitusi negara. "Integritas itu tidak cukup hanya jujur saja. Orang jujur, tapi tidak punya kapasitas dan kompetensi bisa berbahaya," ucap Soedeson.

Lebih lanjut, politikus Partai Golkar itu menyoroti pentingnya kemampuan calon Hakim MK dalam membedakan antara constitutional rights and open legal policy. Dua konsep ini sering kali bersinggungan tipis sehingga berpotensi menimbulkan persoalan besar jika tidak dipahami dengan benar.

"Kalau salah memahami, negara bisa kacau. Hakim MK harus tahu benar mana hak konstitusional warga negara dan mana ranah kebijakan hukum terbuka," katanya.

Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan, pihaknya akan mengambil keputusan terkait persetujuan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal Hakim MK pada rapat paripurna hari ini. Menurut rencana, rapat paripurna akan digelar pada siang hari pukul 13.00 WIB. ■ PV